

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

MUHAMMAD RINALDY
NPP. 30.0030

Asdaf Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
Program Studi Keuangan Publik
Pembimbing Skripsi: Ibu Elvira Mulya Nalien, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement : *Regional Financial Statements are one of the components that become a reference in measuring Regional Financial Performance. Looking at the level of ability of a region in carrying out its regional autonomy, especially in implementing fiscal decentralization. Bireuen Regency has problems related to the amount of Transfer Funds to regional revenues. Purpose:* The purpose of this study is to analyze the ability of Bireuen Regency to implement fiscal decentralization by measuring its Regional Financial Performance using Regional Financial Ratio Analysis based on (Mahmudi, 2019). In addition, to find out the inhibiting factors of Bireuen Regency Financial Performance and the efforts that have been made by the Bireuen Regency Regional Government in overcoming these obstacles. **Method :** The method used in this study is a Qualitative Approach, Descriptive Method with an Inductive Thinking Framework. The secondary data used in this study is the Bireuen Regency Budget Realization Report for 2019 to 2021. Then for Primary Data obtained from the results of Semi-Structured Interviews and documentation. Data analysis using the Method of Reduction, Data Presentation and Conclusion. **Result:** The results of the study based on Financial Statement Analysis show that the Financial Performance of Bireuen Regency is good. **Conclusion:** Looking at the results of the analysis of the five ratios, only two of them are categorized as not good, namely the level of regional financial independence which is still very low and the compatibility of regional spending which is still not good. This is due to inhibiting factors such as the lack of quality of Human Resources and supporting facilities for the potential of Regional Original Revenue that has not been updated and the level of taxpayer awareness that is still very low. Efforts that have been made by local governments are to increase the quantity and quality of Human Resources with technical guidance or training, improve management and tax principal relief policies with certain provisions and optimize the intensification and extensification of regional revenues. **Suggestion:** Optimizing the Quality Improvement of Human Resources and Financial Performance Support Facilities, Making Innovations that Can Increase Awareness of Taxpayers and Levies and Increase Regional Tax and Regional Levy Revenues.

Keywords: Financial Ratio Analysis, Financial Performance, Financial Statements

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu komponen yang menjadi acuan dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah. Melihat tingkat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya terutama dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Kabupaten Bireuen memiliki permasalahan terkait besarnya Dana Transfer terhadap pendapatan daerah. **Tujuan :** Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis kemampuan Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya yang menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah berdasarkan (Mahmudi, 2019). Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dari Kinerja Keuangan Kabupaten Bireuen serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam mengatasi penghambat dimaksud. **Metode :** Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah Pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif dengan Kerangka Berpikir Induktif. Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 hingga 2021. Kemudian untuk Data Primer diperoleh dari hasil Wawancara Semi Terstruktur serta dokumentasi. Analisis data menggunakan Metode Reduksi, Penyajian Data serta Penarikan Kesimpulan. **Hasil :** Hasil penelitian berdasarkan Analisis Laporan Keuangan menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Bireuen sudah baik. **Kesimpulan :** Melihat dari hasil analisis kelima rasio, hanya dua diantaranya dikategorikan kurang baik, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih sangat rendah dan keserasian Belanja Daerah yang masih belum baik. Hal tersebut diakibatkan faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana penunjang potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum diperbaharui serta tingkat kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bimbingan teknis atau pelatihan, pembenahan manajemen dan kebijakan keringanan pokok pajak dengan ketentuan tertentu serta mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.. **Saran :** Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Penunjang Kinerja Keuangan, Melakukan Inovasi-Inovasi yang dapat Meningkatkan Kesadaran Para Wajib Pajak dan Retribusi serta Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Kata Kunci: Analisis Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Secara administratif Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan dengan 609 gampong. Era otonomi mendorong Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk dapat mampu meningkatkan potensinya dalam mengelola daerahnya secara mandiri. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten, serta kemampuan potensi daerah yang mendukung. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dinilai dari kinerja keuangan daerah yang dicerminkan melalui suatu laporan keuangan. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pasal 2 Tahun

2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan bertujuan untuk mengukur tingkatan daya kelola dan daya serap anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi fiskal, menjadi bahan evaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pengguna pelaporan. Laporan keuangan menjadi dasar pertanggungjawaban sebagai bentuk hubungan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga semua aktivitas serta kinerja pemerintah harus dapat dibuktikan realisasinya kepada masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran dari tahun 2019 - 2021, dapat dilihat bahwa secara umum sudah meningkat dalam segi pendapatan daerahnya walaupun ditahun 2020 sempat mengalami penurunan. Akan tetapi berdasarkan proporsi sumber pendapatan daerah terbesar Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 - 2021 berasal dari pendapatan transfer. Artinya pendapatan Kabupaten Bireuen masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat yang terbukti dengan besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sisi anggaran rutin, yakni bantuan daerah otonom yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah. Akibatnya, ketergantungan yang besar terhadap pusat tersebut memungkinkan daerah dapat mengalami financial distress (tekanan berat keuangan) karena sulit menanggung beban keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2019 sebesar Rp. 73.210.792.404, tahun 2020 sebesar Rp. 74.912.423.831, dan tahun 2021 sebesar Rp. 81.807.549.723. SILPA pada dasarnya digunakan untuk menutup defisit anggaran serta dialokasikan untuk menunjang program - program pembangunan daerah. Namun Kabupaten Bireuen selalu mengalami surplus pada tiga tahun kebelakang. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Bireuen perlu mengoptimalkan dalam penyerapan anggarannya. Persoalan ini mencerminkan Pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam mengelola keuangan daerah perlu lebih dimaksimalkan. Kinerja Keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kualitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Upaya menilai kinerja pemerintah begitu penting dilakukan dalam perolehan berbagai informasi keuangan daerah. Menilai kinerja keuangan daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan dasar (Mardiasmo, 2004) yakni:

1. Membantu pencapaian alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan;
2. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
3. Mewujudkan akuntabilitas publik serta membantu memperbaiki tingkat komunikasi kelembagaan.

Permasalahan - permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan keuangan menjadi alasan mengapa analisis laporan keuangan tersebut perlu dilakukan. Kelemahan - kelemahan yang ditemukan nantinya akan dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten Bireuen untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya dimasa mendatang.

Berdasarkan persoalan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai bentuk kontribusi dalam membantu mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, referensi, pertimbangan, serta pembuatan keputusan/kebijakan. Maka dari itu,

penulis mengangkat judul "Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh."

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ida Adzilla Siregar dan Fitri Saragih yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah, Studi Kasus: Kota Tebing Tahun 2014-2019 menjelaskan Analisis Rasio Keuangan yang digunakan ialah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Rasio Kemandiriannya sangat rendah dengan kategori instruktif, Rasio Efektivitas yang diperoleh sudah cukup baik, Rasio Efisiensi yang diperoleh begitu buruk, Rasio Keserasian yang diperoleh masih memprioritaskan Belanja Operasi yang sangat besar sehingga masih dikategorikan buruk, dan Rasio Pertumbuhan secara umum mengalami penurunan. Oleh sebab itu, secara umum Kinerja Keuangan Kota Tebing dikategorikan belum baik (Ida adzilla Siregar, 2020).

Kedua, Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulana Nugraha berjudul Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Kasus: Kabupaten Subang Tahun 2014-2017, Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk Rasio Kemandirian masih dikategorikan rendah sekali, Rasio Keserasian Belanja masih memprioritaskan Belanja Operasi yang begitu besar, Rasio Pertumbuhan masih dikategorikan sangat rendah, Rasio Efisiensi yang dihasilkan bisa dikatakan belum efisien, dan untuk Rasio Efektivitasnya sudah dapat dikategorikan baik karena rata-rata sudah di atas 100% dari target yang ada. Secara umum kinerja keuangan Kabupaten Subang belum dikategorikan baik dengan melihat hasil dari rasio keuangan yang diperoleh. (Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulana Nugraha, 2019)

Ketiga, Khairunnisa yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah, Studi Kasus: Kota Medan Tahun 2012-2016 hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk Rasio Kemandirian masih sangat rendah, Rasio Efektivitas yang diperoleh juga masih dibawah standar dikarenakan Pemerintah Kota Medan belum mampu dalam mencapai target pendapatan daerahnya. Secara umum Kinerja Keuangan Kota Medan masih sangat buruk melihat tingkat rasio yang diperoleh rata-rata belum optimal. (Khairunnisa, 2018)

Keempat, Deus Kartika, Setiawan, dan Kusuma yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Studi Kasus: Kabupaten Sukabumi Tahun 2009-2013 hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat Rasio Kemandirian tergolong sangat rendah, Rasio Efektivitas rata-rata sebesar 105,67% (efektif), Rasio Efisiensi tergolong sangat efisien dengan rata-rata presentase 5,02%. Oleh sebab itu, secara umum Kinerja Keuangan Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik berdasarkan perolehan dari hasil ketiga Rasio Keuangan Daerah tersebut. (Deus Kartika, 2016)

Terakhir adalah Fitri Umi Hanik yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Daerah, Studi Kasus: Kabupaten Semarang Tahun 2009-2013 dengan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangannya sudah cukup baik dengan presentase Rasio Kemandirian Daerah rata-rata 14,82% (instruktif), Rasio Efektivitas sebesar 100,14% (efektif), Rasio Efisiensi sebesar 0,76% (efisien), Rasio Keserasian masih memprioritaskan Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan mengalami trend positif, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sudah di atas 2,5% dengan makna Kabupaten

Semarang sangat mampu untuk melakukan pinjaman apabila kekurangan dana. (Fitri Umi Hanik,2014)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan pada penelitian kali ini adalah lokus penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

1.5. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis kemampuan Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya yang menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah berdasarkan (Mahmudi, 2019). Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dari Kinerja Keuangan Kabupaten Bireuen serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam mengatasi penghambat dimaksud..

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Pendekatan Kualitatif. Hal tersebut dikarenakan maksud dari peneliti tidak hanya berfokus pada angka saja namun kejelasan informasi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian Kualitatif sering kali dianggap tabu terhadap angka-angka, namun nyatanya para peneliti yang menggunakan Metode Penelitian Kualitatif perlu mengumpulkan data dan menganalisis angka-angka apabila diperlukan (Afrizal, 2019). Sebagai contohnya pada penelitian ini yang dimana diperlukan untuk menganalisis data dari Laporan Realisasi Anggaran.

Penelitian Kualitatif memiliki karakteristik deskriptif yang berkaitan dengan gambaran situasi atau gejala tertentu yang terjadi di lapangan. Penelitian Kualitatif Deskriptif mengacu pada ciri khas sekelompok masa, benda, serta peristiwa. Metode Deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sebuah skenario dengan menggunakan kata-kata atau statistik serta untuk memberikan profil, klasifikasi jenis atau gambaran proses dalam menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, dan dimana (Neuman, 2006).

Operasional berupa konsep abstrak yang mempermudah dalam mengukur suatu variabel. Operasional adalah penentuan struktur menjadi satu atau lebih variabel terukur (Umar, 2008). Artinya, operasional bertujuan untuk menjabarkan konsep - konsep dalam penelitian menjadi bagian yang lebih khusus agar memudahkan peneliti untuk dipahami dan dianalisis..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Berdasarkan Hasil Analisis Laporan Keuangan.

A. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti ialah menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah dengan tujuan mengukur kinerja keuangan daerah Kabupaten Bireuen. Setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan lima Rasio Keuangan Daerah yaitu, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian Belanja, serta Rasio Pertumbuhan. Berikut dari hasil analisis dari lima rasio yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan (Mahmudi, 2019).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan digunakan sebagai indikator guna mengetahui tingkat ketergantungan keuangan dari pusat atau eksternal dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pendapatan eksternal berupa pendapatan daerah yang sumbernya selain dari Pendapatan Asli Daerah. Sumber tersebut didapatkan dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta bantuan/pinjaman pemerintah daerah lainnya. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Kemudian Transfer Pemerintah Daerah ialah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dan Pendapatan Dana Otonomi Khusus. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga dapat diukur dengan tingkat rasio kemandirian daerah ini. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Upaya menghitung tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah/dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan dari rumus di atas realisasi PAD menjadi tolak ukur dalam menghitung Rasio Kemandirian. Berikut merupakan hasil dari perhitungan tingkat kemandirian Kabupaten Bireuen.

- a) Tahun 2019: $\frac{156.528.834.490,69}{1.733.382.606.477,23} \times 100\% = 9,0\%$
- b) Tahun 2020: $\frac{162.162.621.716,81}{1.675.263.514.878,00} \times 100\% = 9,6\%$
- c) Tahun 2021: $\frac{173.287.820.620,12}{1.732.575.260.201,00} \times 100\% = 10,0\%$

Berikut tabel hasil analisis tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 1
Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2019 - 2021

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Povinsi dan Pinjaman (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2019	156.528.834.490,69	1.733.382.606.477,23	9,03	Instruktif
2020	162.162.621.716,81	1.675.263.514.878,00	9,68	Instruktif
2021	173.287.820.620,12	1.732.575.260.201,00	10,0	Instruktif

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021, diolah peneliti

Hasil perhitungan di atas terlihat bahwa kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan serta pembangunan masih sangat rendah setiap tahunnya. Tingkat presentase yang diperoleh dikatakan baik apabila mencapai angka 50 hingga 100 persen (Halim, 2002). Rasio Kemandirian pada tahun 2019 ialah 9,03%, 9,68% pada tahun 2020, serta 10,0% pada tahun 2021. Rata-rata hasil Rasio Kemandirian Daerah yang diperoleh tersebut tergolong dalam kategori “Instruktif” dengan presentase dibawah 20%. Instruktif artinya daerah yang bersangkutan dianggap kurang berhasil dalam menjalankan pemerintahannya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Bireuen setiap tahunnya.

Berikut tabel uraian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2
Uraian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021

Sumber	Tahun					
	2019 (Rp)		2020 (Rp)		2021 (Rp)	
Pajak Daerah	22.232.789.426	99%	18.756.911.441	85%	23.219.082.203	78%
Retribusi Daerah	11.219.360.112	98%	10.227.641.020	93%	10.356.577.765	77%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	4.975.440.041	100%	4.971.510.774	100%	4.229.816.175	100%
Lain-Lain PAD yang Sah	108.485.958.921	101%	128.206.558.481	100%	135.487.931.077	109%

Jumlah	156.528.834.490	100%	162.162.621.716	96%	173.287.820.620	101%
---------------	-----------------	------	-----------------	-----	-----------------	------

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021, diolah peneliti

Secara umum untuk setiap tahunnya capaian target Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh rata-rata dengan presentase 99% yang didominasi oleh lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam tiga tahun kebelakang. Walaupun demikian, Kabupaten Bireuen masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pendapatan transfer yang begitu besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Setiap tahunnya rata-rata pendapatan transfer mencapai 88,47% dari total pendapatan daerah. Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Zamri, SE pada tanggal 9 Januari 2023 di ruangan beliau, mengungkapkan bahwa hal demikian salah satunya disebabkan karena potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Bireuen sulit ditingkatkan. Salah satu alasannya ialah karena Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah dengan minim pengunjung atau bukan tempat tujuan yang sering didatangi masyarakat luar. Oleh sebab itu, pajak maupun retribusi yang dapat dipungut tidak begitu besar pula.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan Asli Daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio yang diperoleh maka semakin baik tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Rumus berikut menjadi tolak ukur dalam perhitungan tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan kinerja daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai ialah seratus persen atau lebih (Mahmudi, 2019). Hasil dari perhitungan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen ialah sebagai berikut.

- Tahun 2019: $\frac{156.346.689.900,92}{156.245.085.621,00} \times 100\% = 100,18\%$
- Tahun 2020: $\frac{162.162.621.716,81}{168.605.990.755,15} \times 100\% = 96,18\%$
- Tahun 2021: $\frac{173.287.820.620,12}{170.328.644.449,00} \times 100\% = 101,74\%$

Berikut tabel hasil analisis Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bireuen.

Tabel 3
Hasil Analisis Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2019 - 2021

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2019	156.245.085.621,00	156.346.689.900,92	100,18	Sangat Efektif
2020	168.605.990.755,15	162.162.621.716,81	96,18	Cukup Efektif
2021	170.328.644.449,00	173.287.820.620,12	101,74	Sangat Efektif

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021, diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 dan 2021 dikategorikan sangat baik atau “Efektif” dengan presentase melebihi seratus persen. Rata-rata Kabupaten Bireuen mampu merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah bahkan lebih dari yang ditargetkan. Berbeda dengan tahun 2020 hasil Rasio Efektivitas yang diperoleh ialah kategori “Cukup Efektif” dengan presentase antara 90 hingga 99 persen. Artinya Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah secara optimal atau hingga seratus persen. Berdasarkan ungkapan Junaidi, SE selaku Kepala Bidang Penagihan bertempatan di ruangan beliau pada tanggal 9 Januari 2023, bahwa pada tahun 2020 merupakan masa transisi daerah dalam menghadapi Covid-19. Kondisi ekonomi daerah yang belum stabil menjadikan dampak negatif bagi pendapatan yang diperoleh daerah.

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efisiensi merupakan indikator pendukung tingkat efektivitas suatu daerah dalam pengelolaan keuangan. Daerah yang dianggap efektif dalam pengelolaan keuangannya belum tentu baik jika tingkat efisiensinya tidak baik pula. Jadi guna memperoleh ukuran yang lebih baik, Rasio Efektivitas perlu dibandingkan dengan Rasio Efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio Efisiensi akan menggambarkan perbandingan antara besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapat Asli Daerah riil yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat efisiensi dikatakan baik apabila capaiannya kurang dari 40 persen. Semakin kecil persentase yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja yang dicapai pemerintah (Mahmudi, 2019). Pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diperoleh sehingga dapat diketahui kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Perhitungan tersebut dapat menggunakan rumus di bawah ini.

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Biaya\ untuk\ merealisasikan\ PAD}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen yang dihitung menggunakan rumus tersebut menghasilkan presentase sebagai berikut.

- a) Tahun 2019: $\frac{1.369.622.386,00}{156.346.689.900,92} \times 100\% = 0,87\%$
- b) Tahun 2020: $\frac{972.933.842,00}{162.162.621.716,81} \times 100\% = 0,59\%$
- c) Tahun 2021: $\frac{882.408.728,00}{173.287.820.620,12} \times 100\% = 0,51\%$

Berikut tabel hasil Analisis Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 4
Hasil Analisis Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2019 - 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2019	156.346.689.900,92	1.369.622.386,00	0,87	Sangat Efisien
2020	162.162.621.716,81	972.933.842,00	0,59	Sangat Efisien
2021	173.287.820.620,12	882.408.728,00	0,51	Sangat Efisien

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021, diolah peneliti

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun kebelakang dikategorikan “Sangat Efisien” dengan presentase kurang dari 10 persen. Perolehan rata-rata dari rasio efisiensinya hanya 0,65%. Setiap tahunnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah terus menurun. Artinya tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Tingkat efisien yang diperoleh merupakan hasil dari kinerja keuangan yang baik dari segi penggunaan anggaran. Dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan pajak dan retribusi dikelola sebaik mungkin sesuai dengan porsi yang ada sehingga tidak terjadinya pemborosan dalam penggunaan anggaran. Kondisi seperti ini harapannya dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen serta dapat memproyeksi pada kemajuan daerah tersebut.

4. Rasio Keserasian Belanja

Tingkat Keserasian Belanja dapat memberikan gambaran suatu daerah bagaimana dalam memprioritaskan dananya dalam Belanja Modal maupun Belanja Operasi dengan baik. Porsi Belanja Operasi umumnya mendominasi Belanja Daerah yang berkisar antara 40 hingga 60 persen serta 10 sampai 20 persen porsi dari Belanja Modal (Mahmudi, 2019). Secara ideal rasio ini tidak ditetapkan tingkatan persentase yang diharuskan, tetapi sebagai negara berkembang diharapkan dapat mengelola dananya yang dapat memicu kesejahteraan dan pembangunan nasional.

Tingkat keserasian belanja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

Tingkat Keserasian Belanja Kabupaten Bireuen yang dihitung dari rumus di atas menunjukkan hasil sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{a) Tahun 2019: Belanja Operasi} &= \frac{1.058.376.440.066}{1.978.276.904.651} \times 100\% = 53,49\% \\ \text{Belanja Modal} &= \frac{295.399.475.653}{1.978.276.904.651} \times 100\% = 14,93\% \\ \text{b) Tahun 2020: Belanja Operasi} &= \frac{1.037.105.248.459}{1.904.997.365.934} \times 100\% = 54,44\% \\ \text{Belanja Modal} &= \frac{235.210.628.805}{1.904.997.365.934} \times 100\% = 12,34\% \\ \text{c) Tahun 2021: Belanja Operasi} &= \frac{1.087.877.449.192}{2.043.592.638.000} \times 100\% = 53,23\% \\ \text{Belanja Modal} &= \frac{335.467.153.484}{2.002.162.345.657} \times 100\% = 16,75\% \end{aligned}$$

Berikut tabel hasil Analisis Rasio Keserasian Belanja Kabupaten Bireuen.

Tabel 6
Hasil Analisis Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 – 2021

Tahun Anggaran	APBD (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Operasi terhadap APBD (%)	Belanja Modal terhadap APBD (%)
2019	1.978.276.904.651	1.058.376.440.006	295.399.475.653	53,49	14,93
2020	1.904.997.365.934	1.037.105.248.459	235.210.628.805	54,44	12,34
2021	2.002.162.345.657	1.087.877.449.192	335.467.153.484	53,23	16,75

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021, diolah peneliti

Hasil yang diperoleh dari perhitungan rasio tersebut menunjukkan bahwa untuk Belanja Operasi yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bireuen dari tahun 2019 sampai tahun 2021 lebih besar dibandingkan Belanja Modal. Rata-rata aktivitas Belanja Operasi yang dihasilkan dari tahun 2019 hingga 2021 ialah sebesar 53,72% sedangkan untuk aktivitas dari Belanja Modal hanya sebesar 14,67%. Sebagai wilayah yang berada di negara berkembang, peran pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan pembangunan masih cukup penting dan substansial. Oleh sebab itu, aktivitas Belanja Modal harus ditingkatkan serta diperluas sesuai dengan kondisi pembangunan Kabupaten Bireuen.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan akan menggambarkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan capaiannya dalam setiap periode. Hasil presentase pertumbuhan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap potensi-potensi mana saja yang sekiranya perlu mendapat perhatian khusus. Pada penelitian ini peneliti mengukur Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dengan membandingkan tiap komponennya dengan komponen di tahun sebelumnya.

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini akan menggambarkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah apakah mengalami pertumbuhan secara positif ataupun negatif. Sehingga suatu daerah dapat mencerminkan kualitas kinerjanya dalam memanfaatkan potensi serta inovasi pembangunan terhadap wilayahnya. Seperti yang dihasilkan pada rasio-rasio sebelumnya dimana Kabupaten Bireuen masih sangat bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat. Adanya perhitungan rasio ini guna mengukur sejauh mana upaya daerah untuk terus meningkatkan ataupun mempertahankan Pendapatan Asli Daerahnya tersebut. Adapun rumus yang dapat menghitung tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ialah sebagai berikut.

$$\text{Presentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } (p-1)}{\text{PAD Tahun } (p-1)} \times 100\%$$

Hasil presentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen yang dihitung dari rumus di atas sebagai berikut.

- a) Tahun 2019: $\frac{156.528.834.490,69 - 179.476.248.778,22}{179.476.248.778,22} \times 100\% = 12,78\%$
 b) Tahun 2020: $\frac{162.162.621.716,81 - 156.528.834.490,69}{156.528.834.490,69} \times 100\% = 3,59\%$
 c) Tahun 2021: $\frac{173.287.820.620,12 - 162.162.621.716,81}{162.162.621.716,81} \times 100\% = 6,86\%$

Berikut tabel hasil Analisis Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bireuen.

Tabel 7
Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2019 - 2021

Tahun Anggaran	PAD Tahun p (Rp)	PAD Tahun (p-1) (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
2018-2019	156.528.834.490,69	179.476.248.778,22	12,78
2019-2020	162.162.621.716,81	156.528.834.490,69	3,59
2020-2021	173.287.820.620,12	162.162.621.716,81	6,86

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2018 - 2021, diolah peneliti

Secara umum setiap tahunnya Kabupaten Bireuen terus mengalami pertumbuhan pada Pendapatan Asli Daerahnya. Artinya tidak ada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat negatif sehingga kemampuan Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah dapat dikatakan baik. Hal ini tidak terlepas dari segala upaya sumber daya pemerintah yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam membangun Kabupaten Bireuen yang lebih maju.

b. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dimana rasio ini menggambarkan presentase dari aktivitas Belanja Daerah setiap tahunnya. Sebelum menghitung rasio pertumbuhannya berikut tabel di bawah menunjukkan proporsi Belanja Daerah dari tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 8
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Total Belanja (Rp)
2019	1.058.376.440.066	295.399.475.653	1.383.775.915.719	1.926.156.612.167
2020	1.037.105.248.459	235.210.628.805	1.287.633.110.604	1.888.989.860.025
2021	1.087.877.449.192	335.467.153.484	266.580.000	1.963.840.354.025

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021, diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas Belanja Daerah pada tahun 2019 dan 2020 didominasi oleh Belanja Tak Terduga. Belanja Tak Terduga digunakan pada keadaan darurat/mendesak, bencana sosial, pengembalian atas lebih penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.:

Selanjutnya melihat pada sisi aktivitas Belanja Operasi Kabupaten Bireuen begitu besar dibandingkan dengan Belanja Modal. Belanja Operasi yang termasuk didalamnya ialah belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, serta belanja lainnya. Sedangkan yang termasuk Belanja Modal yaitu belanja tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan belanja aset lainnya. Alasan besarnya aktivitas Belanja Operasi ketimbang Belanja Modal sama seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran Junaida,SE pada pembahasan Rasio Keserasian Belanja di atas.

Adapun rumus yang dapat menghitung tingkat pertumbuhan Belanja Daerah ialah sebagai berikut.

$$\text{Presentase pertumbuhan Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Daerah Tahun } p - \text{Belanja Daerah Tahun } (p-1)}{\text{Belanja Daerah } (p-1)} \times 100\%$$

Hasil presentase pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen yang dihitung dari rumus di atas sebagai berikut.

- a) Tahun 2019: $\frac{1.926.156.612.167 - 1.761.174.172.771}{1.761.174.172.771} \times 100\% = 9,36\%$
- b) Tahun 2020: $\frac{1.888.989.860.025 - 1.926.156.612.167}{1.926.156.612.167} \times 100\% = -1,92\%$
- c) Tahun 2021: $\frac{1.963.844.707.810 - 1.888.989.860.025}{1.888.989.860.025} \times 100\% = 3,96\%$

Berikut tabel hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 9
Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021

Tahun Anggaran	Belanja Daerah Tahun p (Rp)	Belanja Daerah Tahun (p-1) (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah (%)
2018-2019	1.926156.612.167	1.761.174.172.771	9,36
2019-2020	1.888.989.860.025	1.926156.612.167	-1,92
2020-2021	1.963.844.707.810	1.888.989.860.025	3,96

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2018 - 2021, diolah peneliti

Pada tabel di atas menunjukkan pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen bersifat dinamis. Pada tahun 2019 Belanja Daerah Kabupaten Bireuen mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 9,36%. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 yang juga begitu signifikan dengan presentase 12,78%. Begitupula dengan kondisi aktivitas Belanja Daerah pada tahun 2020 yang menurun menjadi minus 1,92%. Hal tersebut juga searah dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang menurun menjadi 3,59%. Kemudian seiring meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021, Belanja Daerah juga ikut meningkat menjadi 3,96%.

Hasil dari kelima Analisis Rasio Keuangan Daerah yang dibahas di atas kemudian disederhanakan kedalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 10
Hasil Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2019 - 2021

Rasio Kinerja Keuangan Daerah		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		9,03	9,68	10,0
Rasio Efektifitas PAD		100,18	96,18	101,74
Rasio Efisiensi PAD		0,87	0,59	0,51
Rasio Kesorasian Belanja	Belanja Operasi Terhadap APBD	53,49	54,44	53,23
	Belanja Modal Terhadap APBD	14,93	12,34	16,75
Rasio Pertumbuhan	PAD	12,78	3,59	6,86
	Belanja Daerah	9,36	-1,92	3,96

Sumber: LRA Kabupaten Bireuen Tahun 2019 - 2021, diolah peneliti

Berdasarkan hasil Analisis Rasio Keuangan diperoleh ada beberapa rasio yang di kategorikan baik dan juga belum baik. Rasio Kemandirian Keuangan memperoleh hasil “Instruktif” atau dengan rata-rata 9,57%, yang artinya sangat rendah. Rasio Efektifitas

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh memiliki kategori “Cukup Baik” dengan rata-rata 99,1%, artinya kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sudah baik, namun masih harus ditingkatkan lagi hingga mencapai seratus persen atau lebih dengan kategori “Efektif”. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dikategorikan “Sangat Efisien” dengan rata-rata 0,65%, artinya capaian yang diperoleh ini sudah sangat baik dalam mengelola anggaran insentif pada pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Rasio Keserasian Belanja yang dihasilkan menunjukkan Kabupaten Bireuen lebih memprioritaskan belanjanya pada Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal. Oleh sebab itu keadaan Belanja Modal yang harus ditingkatkan lagi sehingga memproyeksi pembangunan daerah dimasa mendatang. Selanjutnya, Rasio Pertumbuhan Kabupaten Bireuen memiliki Kinerja Keuangan Daerah yang baik pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang dibuktikan dengan tren positif yang dialami setiap tahunnya, begitu pula dengan pertumbuhan belanja yang searah dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari tren naik turunnya sehingga hasil Rasio Pertumbuhan Kabupaten Bireuen dikategorikan baik.

Secara umum kelima hasil Analisis Rasio Keuangan di atas sudah dapat mencerminkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Adapun Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen dapat dikatakan sudah baik melihat dari kelima hasil Analisis Rasio Keuangan dengan tiga diantaranya dikategorikan baik, yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah serta Rasio Pertumbuhan. Kemudian untuk Rasio yang tergolong kurang baik ialah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian Belanja Daerah sehingga masih membutuhkan pembenahan-pembenahan dari pemerintah agar mencapai tujuan yang diharapkan.

3.2. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen

Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari beberapa narasumber.

- a. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Masih Belum Diperbaharui.
- b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Yang Rendah.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen dalam rangka meningkatkan keuangan daerahnya ialah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Melakukan Pembenahan Manajemen serta Kebijakan Keringanan Pokok Pajak
- c. Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

3.4. Diskusi Temuan Utama

Berdasarkan laporan realisasi anggaran dari tahun 2019 - 2021, dapat dilihat bahwa secara umum sudah meningkat dalam segi pendapatan daerahnya walaupun ditahun 2020 sempat mengalami penurunan. Akan tetapi berdasarkan proporsi sumber pendapatan daerah terbesar Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 - 2021 berasal dari

pendapatan transfer. Artinya pendapatan Kabupaten Bireuen masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat yang terbukti dengan besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sisi anggaran rutin, yakni bantuan daerah otonom yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah. Akibatnya, ketergantungan yang besar terhadap pusat tersebut memungkinkan daerah dapat mengalami financial distress (tekanan berat keuangan) karena sulit menanggung beban keuangan.

Penelitian terdahulu yang ditampilkan di atas merupakan beberapa pedoman sebagai upaya untuk penyempurnaan pada skripsi ini. Pada kelima penelitian terdahulu di atas hanya dua diantaranya menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Artinya kebanyakan untuk menganalisis rasio keuangan menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif yang hanya berpedoman pada data sekunder saja. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti akan lebih berinteraksi di lapangan dengan menggali berbagai informasi lebih mendalam demi terjawabnya apa saja faktor yang mempengaruhi terhambatnya kinerja keuangan serta upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Melihat dari hasil analisis kelima rasio, hanya dua diantaranya dikategorikan kurang baik, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih sangat rendah dan keserasian Belanja Daerah yang masih belum baik. Hal tersebut diakibatkan faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana penunjang potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum diperbaharui serta tingkat kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bimbingan teknis atau pelatihan, pembenahan manajemen dan kebijakan keringanan pokok pajak dengan ketentuan tertentu serta mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kabupaten saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2019). Metode Penelitian Kualitatif (ke-4). PT RajaGrafindo Persada.
- Farida, A., I. & Nugraha, R., F. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2).
- Hanik, F., U. & Karyanti, T., D. (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja. *Jurnal Akuntansi*, 22(2).

Kartika, D., & Kusuma. (2016). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2).

Khairunnisa. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016. Skripsi Akuntansi.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ed. 4). UUP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (1st ed.)

Neuman, W. L. (2006). *Social research methods qualitative and quantitative approach* (6th ed.)

Saragih, Fitriani & Siregar, I., A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Enginnering & Humaniora Jurnal*.

Umar. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

